BASELINE: JURNAL MAHASISWA MAGISTER MANAJEMEN
Vol. 3, No. 1, January 2026, 127-141

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA KEPENGHULUAN TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT YANG DI MEDIASI TRANSPARANSI DI KECAMATAN PEKAITAN

Ulfa Laili[1], Anto Ariyanto[2*]

[1,2*] Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana kepenghuluan terhadap kepercayaan masyarakat dengan transparansi sebagai variabel mediasi di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 61 anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) sebagai responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling jenuh*, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung dan dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana kepenghuluan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi, sedangkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara akuntabilitas pengelolaan dana kepenghuluan dan kepercayaan masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip pertanggungjawaban yang disertai keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana kepenghuluan. Penguatan kedua prinsip tersebut diperlukan untuk mendukung tata kelola keuangan yang lebih terbuka dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.

KATA KUNCI

Akuntabilitas; Transparansi; Kepercayaan Masyarakat; Dana Kepenghuluan.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintahan desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai program sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, kewenangan tersebut juga membawa tanggung jawab yang besar karena setiap sumber daya keuangan publik harus dikelola secara tepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana tidak cukup hanya dinilai berdasarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran, tetapi juga perlu memperhatikan kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan masyarakat, kejelasan proses pengambilan keputusan, serta keterbukaan informasi mengenai hasil pelaksanaannya. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip mendasar dalam tata kelola keuangan pemerintahan desa.

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Peraturan tersebut menjadi bagian dari kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengaturan mengenai kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Kewenangan dalam mengelola sumber daya

* **Anto Ariyanto.** Email: antoariyanto@unilak.ac.id

ISSN 3089-6029 (online ISSN)
© 2026

publik perlu diikuti dengan tanggung jawab untuk menjelaskan keputusan, penggunaan anggaran, dan hasil kegiatan kepada masyarakat serta pihak yang berwenang. Dengan demikian, pengelolaan dana kepenghuluan tidak hanya berhubungan dengan aspek administratif dan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemerintah kepenghuluan dengan masyarakat.

Pentingnya tata kelola dana yang akuntabel semakin terlihat ketika pengelolaan keuangan publik dihadapkan pada risiko penyimpangan dan lemahnya pengawasan. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporan pemantauan tren korupsi tahun 2023 mencatat sebanyak 187 kasus korupsi pada sektor desa dengan 294 orang tersangka. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan sektor-sektor lain dalam pemetaan kasus korupsi tahun 2023. Data ICW juga memperlihatkan perkembangan kasus korupsi sektor desa dari 17 kasus pada 2016 menjadi 187 kasus pada 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada tingkat desa memerlukan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai. Meskipun data tersebut menggambarkan kondisi secara nasional dan tidak secara langsung menunjukkan adanya penyimpangan di Kecamatan Pekaitan, informasi tersebut memberikan konteks mengenai pentingnya penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana kepenghuluan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi mandat untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Dalam pengelolaan dana kepenghuluan, prinsip tersebut tercermin melalui kejelasan perencanaan dan alokasi anggaran, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan, serta tersedianya mekanisme pengawasan dan pemeriksaan. Mardiasmo (2018) menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya publik karena penyelenggara pemerintahan harus mampu memberikan penjelasan atas keputusan dan penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan tersusunnya dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah memberikan informasi yang dapat dinilai dan diverifikasi oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam perspektif tata kelola publik, akuntabilitas memiliki hubungan erat dengan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah yang mampu menunjukkan kejelasan mengenai penggunaan anggaran, dasar pengambilan keputusan, dan hasil program akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai kinerja pengelolanya. Sebaliknya, ketika informasi pertanggungjawaban tidak tersedia atau sulit dipahami, masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam menilai apakah dana telah digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas pengelola dan menurunkan keyakinan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, akuntabilitas dapat dipandang sebagai salah satu dasar pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kepenghuluan.

Kepercayaan masyarakat merupakan unsur penting dalam hubungan antara pemerintah dan warga yang dilayaninya. Kepercayaan tidak hanya menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan pemerintah, tetapi juga menggambarkan keyakinan bahwa penyelenggara pemerintahan memiliki kemampuan, integritas, serta kesungguhan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam konteks pengelolaan dana kepenghuluan, masyarakat perlu memiliki keyakinan bahwa anggaran yang tersedia digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan. Kepercayaan tersebut dapat terbentuk ketika masyarakat memperoleh penjelasan yang memadai, melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui

komunikasi pemerintah, tetapi juga melalui praktik pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan antara akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat telah mendapat perhatian dalam penelitian mengenai tata kelola pemerintahan desa. Aprilia (2019) mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Kajian mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Uhardi, Pribadi, dan Losi (2023) juga menempatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagai aspek yang berhubungan dengan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, Ryandi dan Sari (2024) mengkaji hubungan akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan publik dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel mediasi. Berbagai kajian tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik perlu dipahami melalui lebih dari satu prinsip tata kelola. Akuntabilitas dan transparansi memiliki peran yang saling berkaitan, tetapi keduanya menggambarkan aspek pengelolaan yang berbeda.

Selain akuntabilitas, transparansi merupakan prinsip yang menentukan sejauh mana masyarakat dapat mengetahui dan memahami proses pengelolaan dana kepenghuluan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam praktiknya, transparansi dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai perencanaan anggaran, rincian alokasi dana, pelaksanaan kegiatan, realisasi penggunaan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban. Informasi tersebut perlu disampaikan secara jelas dan tepat waktu agar masyarakat tidak hanya mengetahui jumlah dana yang dikelola, tetapi juga memahami tujuan penggunaannya serta hasil yang telah dicapai. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Transparansi juga memiliki dimensi partisipatif karena keterbukaan informasi memberikan dasar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan. Informasi yang hanya tersedia dalam dokumen administratif, tetapi tidak disampaikan melalui media atau mekanisme yang dapat dijangkau masyarakat, belum sepenuhnya mencerminkan keterbukaan yang substantif. Pemerintah kepenghuluan perlu memastikan bahwa informasi dapat dipahami oleh masyarakat dengan mempertimbangkan bentuk penyampaian, bahasa, waktu, dan aksesibilitasnya. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, memberikan masukan, serta mengawasi penggunaan dana. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi mekanisme yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan publik.

Dalam kaitannya dengan kepercayaan masyarakat, transparansi memberikan kesempatan bagi warga untuk menilai apakah pemerintah benar-benar menjalankan tanggung jawabnya. Ketika pemerintah menyediakan informasi yang dapat diverifikasi, masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi kebijakan dan penggunaan dana. Keterbukaan tersebut dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pihak pengelola dan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil pembangunan. Sebaliknya, keterbatasan akses informasi dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika masyarakat tidak mengetahui dasar penentuan prioritas anggaran maupun perkembangan pelaksanaan program. Dengan demikian, transparansi menjadi salah satu kondisi penting yang memungkinkan akuntabilitas diterjemahkan ke dalam informasi yang dapat diketahui dan dinilai oleh masyarakat.

Hubungan antara akuntabilitas dan transparansi juga perlu diperhatikan dalam menjelaskan proses terbentuknya kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas menekankan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan dana, sedangkan transparansi menekankan keterbukaan informasi mengenai proses serta hasil pengelolaan

tersebut. Dalam praktik tata kelola, pertanggungjawaban yang telah disusun oleh pemerintah akan memiliki makna yang lebih besar ketika informasinya dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan untuk memenuhi kewajiban administratif. Informasi pertanggungjawaban juga perlu dibuka agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Mekanisme inilah yang memberikan dasar konseptual bagi penempatan transparansi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara akuntabilitas pengelolaan dana kepenghuluan dan kepercayaan masyarakat.

Penempatan transparansi sebagai variabel mediasi juga penting karena pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan tidak selalu berlangsung melalui satu jalur. Akuntabilitas dapat membentuk kepercayaan secara langsung melalui persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab dan integritas pengelola. Pada saat yang sama, akuntabilitas dapat mendorong keterbukaan informasi sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk menilai pengelolaan dana secara lebih objektif. Apabila informasi pertanggungjawaban disampaikan secara terbuka, masyarakat dapat membandingkan rencana anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang diperoleh. Transparansi dengan demikian berpotensi menjembatani hubungan antara pertanggungjawaban pengelola dan keyakinan masyarakat terhadap pengelolaan dana. Model tersebut memungkinkan penelitian menguji apakah akuntabilitas berhubungan dengan kepercayaan masyarakat secara langsung maupun melalui transparansi.

Konteks tersebut relevan untuk dikaji pada pemerintahan kepenghuluan di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Pekaitan terdiri atas sepuluh kepenghuluan yang masing-masing menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan anggaran untuk mendukung kegiatan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan yang disajikan dalam naskah penelitian, realisasi anggaran pada periode 2021–2023 dilaporkan mencapai 100% dan dikategorikan efektif. Pada tahun 2023, tiga dari sepuluh kepenghuluan disebut memperoleh kategori sangat efektif dan mendapatkan tambahan dana sebagai insentif atas prestasi kinerja sebesar Rp128.005.000 per kepenghuluan. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai capaian realisasi anggaran di wilayah penelitian. Namun, tingginya realisasi anggaran belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan telah berlangsung secara akuntabel dan transparan atau bahwa masyarakat telah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

Realisasi anggaran pada dasarnya menggambarkan tingkat pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, akuntabilitas dan transparansi berkaitan dengan kualitas proses pengelolaan, pertanggungjawaban, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap pengelolaan dana kepenghuluan perlu melampaui ukuran serapan atau realisasi anggaran. Pemerintah dapat mencapai target realisasi anggaran, tetapi masyarakat masih memerlukan informasi yang memadai mengenai dasar penetapan prioritas, rincian penggunaan dana, hasil kegiatan, dan mekanisme pengawasan. Perbedaan antara capaian realisasi dan persepsi masyarakat tersebut menjadi alasan penting untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas dan transparansi berhubungan dengan kepercayaan masyarakat di Kecamatan Pekaitan.

Dalam penelitian ini, perhatian terhadap kepercayaan masyarakat juga berkaitan dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep). Anggota BPKep dipilih sebagai responden karena salah satu fungsi yang disebutkan dalam naskah penelitian adalah menyampaikan aspirasi masyarakat. Kedudukan tersebut menjadikan anggota BPKep relevan untuk memberikan penilaian mengenai praktik pengelolaan dana kepenghuluan, keterbukaan informasi, dan kepercayaan terhadap pengelolaannya. Meskipun demikian, persepsi anggota BPKep perlu dipahami sesuai dengan posisi dan pengalaman mereka dalam lingkungan pemerintahan kepenghuluan, sehingga interpretasi hasil penelitian harus mempertimbangkan karakteristik responden tersebut.

Penelitian terdahulu telah membahas hubungan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian yang menggunakan transparansi sebagai mekanisme mediasi dalam hubungan antara akuntabilitas pengelolaan dana dan kepercayaan masyarakat masih perlu dikaji sesuai dengan karakteristik wilayah dan kelembagaan yang diteliti. Ryandi dan Sari (2024), misalnya, menempatkan sistem pengendalian internal sebagai variabel mediasi dalam kajian akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik. Sementara itu, Uhardi et al. (2023) membahas beberapa prinsip tata kelola pemerintahan, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, dalam hubungannya dengan kepercayaan publik. Penelitian ini mengambil fokus yang lebih spesifik dengan menguji transparansi sebagai variabel mediasi pada hubungan antara akuntabilitas pengelolaan dana kepenghuluan dan kepercayaan masyarakat di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi dalam memperjelas peran transparansi pada hubungan antara akuntabilitas pengelolaan dana kepenghuluan dan kepercayaan masyarakat. Pengujian terhadap pengaruh langsung akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan, serta pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme tata kelola yang berkaitan dengan pembentukan kepercayaan masyarakat. Secara konseptual, penelitian ini mengintegrasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam satu model hubungan yang menempatkan kepercayaan masyarakat sebagai variabel yang dijelaskan. Secara kontekstual, penelitian berfokus pada pengelolaan dana kepenghuluan di Kecamatan Pekaitan, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi penguatan tata kelola keuangan pada tingkat kepenghuluan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana kepenghuluan terhadap kepercayaan masyarakat, menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi, menganalisis pengaruh transparansi terhadap kepercayaan masyarakat, serta menguji peran transparansi dalam memediasi pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana kepenghuluan terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Pekaitan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian manajemen sektor publik, khususnya mengenai tata kelola keuangan kepenghuluan. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kepenghuluan dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban, meningkatkan keterbukaan informasi, dan membangun hubungan yang lebih terpercaya dengan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana kepenghuluan terhadap kepercayaan masyarakat dengan transparansi sebagai variabel mediasi. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir. Populasi penelitian adalah seluruh anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) se-Kecamatan Pekaitan yang berjumlah 61 orang. Penentuan sampel menggunakan teknik *sampling jenuh*, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan responden penelitian, sehingga jumlah sampel sebanyak 61 orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi responden terhadap tiga variabel penelitian, yaitu akuntabilitas pengelolaan dana kepenghuluan sebagai variabel independen (X), transparansi sebagai variabel mediasi (Z), dan kepercayaan masyarakat sebagai variabel dependen (Y). Pengukuran akuntabilitas mencakup kejelasan pelaporan keuangan, mekanisme audit internal dan eksternal, serta kejelasan tujuan dan alokasi penggunaan dana. Transparansi diukur melalui keterbukaan akses informasi keuangan, frekuensi penyampaian laporan kepada publik, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Sementara itu, kepercayaan masyarakat diukur berdasarkan persepsi terhadap integritas pengelola dana, kepuasan terhadap penggunaan dana, dan partisipasi dalam kegiatan

kepenghuluan yang dibiayai dari dana tersebut. Indikator setiap variabel diadaptasi dari penelitian terdahulu sebagaimana tercantum dalam operasionalisasi variabel penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Analisis dilakukan melalui evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Evaluasi *outer model* mencakup pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk untuk memastikan bahwa indikator mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Selanjutnya, evaluasi *inner model* dilakukan untuk menilai hubungan antarvariabel melalui koefisien jalur (*path coefficient*) dan nilai *R-square* serta *f-square*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan memperhatikan nilai *t-statistics* dan *p-values* pada pengaruh langsung maupun tidak langsung. Pengujian pengaruh tidak langsung digunakan untuk mengetahui peran transparansi dalam memediasi hubungan antara akuntabilitas pengelolaan dana kepenghuluan dan kepercayaan masyarakat. Keputusan pengujian didasarkan pada tingkat signifikansi 5 persen.

Hasil

Gambaran Umum Responden Penelitian

Responden yang digunakan adalah Anggota badan permusyawaratan kepenghuluan dengan jumlah responden sebanyak 61 orang Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung pada responden. Karakteristik responden penelitian didasarkan pada jenis kelamin, usia, tingkat dan pendidikan terakhir. Penjelasan karakteristik responden penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan Terakhir

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
A	**Jenis Kelamin**		
1	Laki – laki	52	87
2	Perempuan	9	13
B	**Umur**		
1	25-35 tahun	21	33
2	35-45 tahun	29	48
3	> 45 tahun	11	19
C	**Pendidikan terahir**		
1	SD	0	0
2	SMP	7	12
3	SMA	52	85
4	S1	2	3
	Total	**61**	**100.0**

Sumber: Data Olahan, 2025

Berdasarkan hasil data olahan penelitian terlihat pada tabel 4.1 dinyatakan dari Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden dengan kategori jenis kelamin yaitu mayoritas berjenis kelamin laki-laki berjumlah 52 responden (87%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 9 responden (13%). Karakteristik responden berdasarkan usia dimulai dari yang memiliki usia range usia 25-35 tahun berjumlah 21

responden (33%), sedangkan pada usia 35-45 tahun berjumlah 29 responden (48.0%) dan pada usia >45 tahun berjumlah 11 responden (19%).

Terlihat dari segi pendidikan dapat dinyatakan bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan SMA dengan jumlah 52 responden (44.3%), disusul oleh tingkat pendidikan SMP berjumlah 7 responden (12%) kemudian tingkat pendidikan S1 berjumlah 2 responden (3%)

Uji Outer Model

Model eksternal (outer model) dinilai berdasarkan validitas konvergen, yang mengukur besarnya faktor muatan untuk masing-masing konstruk. Validitas konvergen dari model pengukuran dengan indikator reflektif dievaluasi melalui korelasi antara skor item dengan skor komponen yang diestimasi menggunakan perangkat lunak PLS. Sebuah ukuran reflektif individu dianggap tinggi jika memiliki korelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur (Ghozali, 2019) Berikut gambar diagram Jalur Outer Model dengan menggunakan Smart PLS

Gambar 1. Outer mode

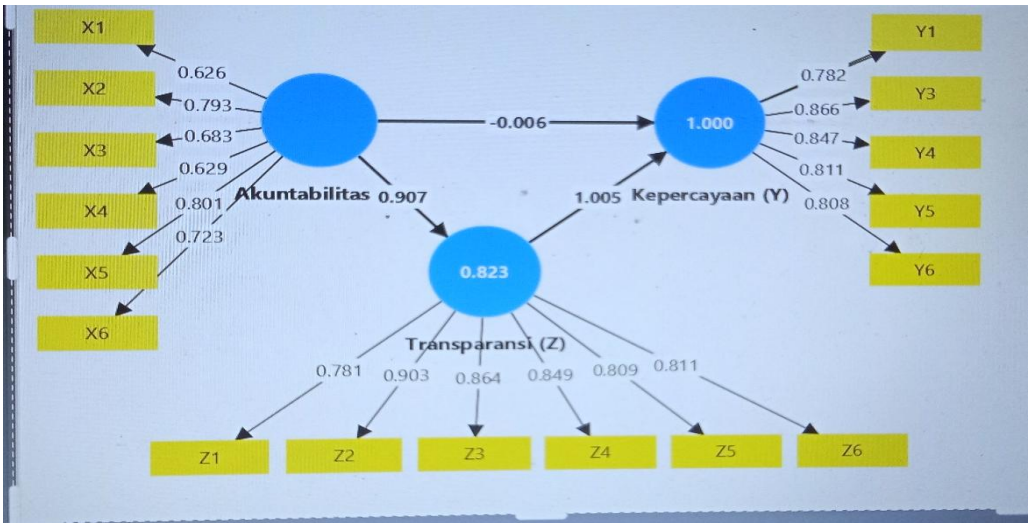

Sumber*:* Data Olahan , 2025

Hair et al. (2014) - Dalam buku mereka "A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)", Hair et al. menyebutkan bahwa nilai loading factor di bawah 0.4 harus dipertimbangkan untuk dihapus, sementara nilai antara 0.4 hingga 0.7 bisa diterima jika indikator tersebut relevan dengan teori dan model yang dibangun. Barclay et al. (1995) - Menyebutkan bahwa meskipun nilai 0.7 adalah target yang baik, dalam beberapa kasus, nilai loading factor yang lebih rendah (misalnya 0.6) bisa diterima asalkan indikator tersebut memberikan kontribusi teoritis yang kuat dan secara keseluruhan model tetap menunjukkan kebaikan kecocokan yang baik (fit). Seperti yang terlihat pada Gambar , nilai loading factor untuk indikator X1 X3 dan X4, berada di bawah 0,70. Dengan demikian, Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara masing-masing indikator dengan konstruk laten yang diukur sangat kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah valid.

a. Discriminant Validity

Tabel 4.4 Uji Reliabilitas (*Composite Reliability*)

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)

X (Akuntabilitas)	0.809	0.824
Z (Transparansi)	0.914	0.916
Y (kepercayaan)	0.914	0.916

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel 4.4 dinyatakan bahwa nilai *composite reliability* dari semua variabel penelitian lebih dari 0,7. Sebuah konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* melebihi 0,70 (Ghozali & Latan, 2015). Hasil ini menunjukkan bahwa setiap variabel telah memenuhi kriteria composite reliability, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.Dari hasil analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semua indikator menunjukkan koefisien korelasi yang lebih tinggi dengan variabelnya masing-masing. Ini menandakan bahwa setiap indikator tersebut secara efektif membentuk variabel atau konstruk yang dimaksud.

3.3. Discriminant Validity

Discriminant validity dapat dievaluasi dengan melihat apakah indikator memiliki loading yang lebih tinggi terhadap konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain.

Tabel 4.3 *Discriminant Validity*

Variabel	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X (Akuntabilitas)	0.860	0.508
Z (Transparansi)	0.933	0.701
Y (kepercayaan)	0.933	0.701

Dari hasil analisis data yang dilakukan terlihat pada Tabel 4.3 *Dicriminant Validity* dapat disimpulkan bahwa semua indikator menunjukkan koefisien korelasi yang lebih tinggi dengan variabelnya masing-masing. Ini menandakan bahwa setiap indikator tersebut secara efektif membentuk variabel atau konstruk yang dimaksud. Untuk menilai *discriminant validity*, dilakukan dengan membandingkan nilai akar AVE dari setiap variabel dengan hubungan antara variabel tersebut dan variabel lainnya. Merujuk hasil pengolahan data diatas, dapat disimpulkan sesuai uji dengan akar AVE ini model memiliki *discriminant validity* yang baik.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur hasil ukur yang stabil atau konstan, serta dapat diandalkan/reliabel. Terindikasi dari jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari beberapa kali *test*, melalui metode *Internal consistency* melalui *fitur composite reliability* dan *koefisien cronbach's Alpha.* Berikut hasil uji reliabilitas :

Tabel 4.4 Uji Reliabilitas (*Composite Reliability*)

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)
X (Akuntabilitas)	0.809	0.824
Z (Transparansi)	0.914	0.916
Y (kepercayaan)	0.914	0.916

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel 4.4 dinyatakan bahwa nilai *composite reliability* dari semua variabel penelitian lebih dari 0,7. Sebuah konstruk dinyatakan reliabel

jika nilai *composite reliability* melebihi 0,70 (Ghozali & Latan, 2015). Hasil ini menunjukkan bahwa setiap variabel telah memenuhi kriteria composite reliability, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Uji Inner Model

Tabel 4.5 Nilai F

Variabel	***F-square***
Akuntabilitas (X)	0.153
Transparansi (Z)	4.656

Berdasarkan Tabel 4.5, diperoleh nilai F-Square x sebesar 0.153 Dengan nilai F-square 0.153, kita bisa menyimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh moderat terhadap variabel endogen, sedangkan Transparansi diperoleh nilai F-Square x sebesar 0,35 berpengaruh besar dalam model yang sedang dianalisis

Pengujian Hipotesis

Tabel 4.6 Uji Hipotesis direct Effect

Variabel	**Direct effect**	**Standard deviation (STDEV)**	**T statistics (|O/ STDEV|)**	**P values**
Akuntabilitas (X) -> Kepercayaan (Y)	0.917	0.034	26.635	0.000
Akuntabilitas (X) -> Transparansi (Z)	0.919	0.032	27.930	0.000
Transparansi (Z) -> Kepercayaan (Y)	1.012	0.015	67.124	0.000

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2025

Berdasarkan Tabel 4.6 alam model ini, transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan baik secara langsung maupun dalam membentuk kepercayaan.Uji dinyatakan bahwa dari hasil pengujian hipotesis dinyatakan bahwa adanya pengaruh Transparansi pengelolaan dana kepenghuluan (X) terhadap Kepercayaan masyarakat yang di mediasi oleh Transparansi di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

H1**:** Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa berpengaruh Positif signifikan terhadap kepercayaan masyarakat

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang diperoleh, terdapat temuan yang signifikan mengenai pengaruh Akuntabilitas (X) terhadap Kepercayaan (Y) dengan nilai direct effect sebesar 0,917 menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kepercayaan masyarakat. Nilai ini lebih dari satu, yang menandakan bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memiliki dampak yang lebih besar terhadap

kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung mempercayai pengelolaan dana desa yang memiliki akuntabilitas tinggi dan transparan, standar deviasi (STDEV) sebesar 0.034 menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan ini memiliki deviasi yang sangat kecil, yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran ini sangat konsisten dan stabil. Artinya, efek akuntabilitas terhadap kepercayaan dapat diprediksi dengan sangat tepat dalam berbagai sampel data yang ada, t-statistics sebesar 26.635 sangat jauh melebihi batas kritis 1.96, yang berarti pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan sangat signifikan secara statistik, dan p-value sebesar 0.000menunjukkan bahwa hasil ini sangat signifikan, dengan nilai p yang jauh lebih kecil dari 0.05, yang mengonfirmasi bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat dapat diterima sebagai bukti yang sangat kuat . Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat

H2: Transparansi Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Hasil yang diperoleh menunjukkan hubungan yang sangat signifikan antara Transparansi (Z) dan Kepercayaan (Y), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:Direct effect = 1.012: Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara transparansi dan kepercayaan sangat kuat dan positif. Setiap peningkatan transparansi akan diikuti oleh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Nilai ini mendekati 1, yang menunjukkan bahwa transparansi memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kepercayaan masyarakat.Standard deviation (STDEV) = 0.015: Standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa pengaruh transparansi terhadap kepercayaan sangat konsisten dan tidak mengalami banyak fluktuasi. Ini mengindikasikan bahwa hasilnya dapat dipercaya dan hasil estimasi ini cukup stabil.T-statistics = 67.124: Nilai t-statistics yang sangat tinggi ini jauh lebih besar dari nilai t-kritis (1.96), yang menunjukkan bahwa hasil ini signifikan secara statistik. Dengan kata lain, transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.P-value = 0.000: P-value yang sangat kecil (lebih kecil dari 0.05) mengindikasikan bahwa hasil yang diperoleh sangat signifikan, dan hipotesis yang diuji diterima. Ini menegaskan bahwa transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, temuan ini mendukung hipotesis H2: Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kepercayaan Masyarakat.

H3: Transparansi Berpengaruh positif signifikan Meningkatkan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Temuan yang diperoleh menunjukkan hubungan yang sangat signifikan antara Akuntabilitas (X) dan Transparansi (Z), dengan hasil yang dapat dijelaskan sebagai berikut:Direct effect = 0.919: Nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara akuntabilitas dan transparansi. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan akuntabilitas yang dilakukan oleh pengelola dana desa dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan hubungan yang sangat signifikan, yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas memiliki kontribusi besar terhadap terciptanya transparansi.Standard deviation (STDEV) = 0.032: Standar deviasi yang rendah ini menunjukkan bahwa estimasi pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi memiliki tingkat keandalan yang tinggi, dengan variabilitas yang

sangat rendah. Hal ini menambah kekuatan temuan.T-statistics = 27.930: Nilai t-statistics yang sangat tinggi ini jauh melebihi batas kritis (1.96), yang menegaskan bahwa pengaruh ini sangat signifikan secara statistik. P-value = 0.000: P-value yang sangat kecil (lebih kecil dari 0.05) menunjukkan bahwa pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi adalah signifikan, yang berarti hipotesis yang diuji diterima.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap transparansi, yang mendukung Hipotesis H3: Transparansi Berpengaruh Positif Meningkatkan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Diskusi

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa terhadap kepercayaan masyarakat.

Perlu menggarisbawahi bahwa akuntabilitas sangat berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Namun, meskipun akuntabilitas sangat penting, kepercayaan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kompetensi pengelola dana dan integritas pengelola. Oleh karena itu, selain meningkatkan akuntabilitas, pengelola dana desa juga perlu memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola dana desa,Keterbatasan Pengelolaan Keuangan Desa: Dalam prakteknya, meskipun akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan, tantangan utama dalam pengelolaan dana desa adalah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa untuk mengelola keuangan dengan baik. Oleh karena itu, pengelola dana desa perlu mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan tentang tata kelola keuangan yang baik, agar bisa menjalankan akuntabilitas dengan lebih efektif.

Implikasi Temuan dalam Konteks yang Lebih Luas terhadap Pembangunan Desa: Temuan ini memiliki implikasi luas bagi pembangunan desa. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, masyarakat lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan sustainabilitas program-program pembangunan desa dalam jangka panjang. Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa: Implikasi lainnya adalah bahwa kepercayaan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan kinerja pemerintah desa. Pemerintah desa yang dipercaya akan lebih mudah menjalankan berbagai program pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa, karena masyarakat mendukung dan berpartisipasi aktif.

Transparansi Pengelolaan dana Desa Temuan ini memiliki implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai alokasi dana dan penggunaan dana tersebut. Hal ini membuat mereka merasa lebih terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengelolaan dana desa, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi pemerintah desa.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Dengan transparansi yang lebih besar, masyarakat akan merasa lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Partisipasi ini penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan bersama.Pengelolaan Dana yang Lebih Efektif: Transparansi yang tinggi akan mendorong pengelola dana desa untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam mengelola dana desa, karena mereka tahu bahwa penggunaan dana akan diawasi oleh masyarakat. Ini juga dapat memperbaiki kualitas pengelolaan dana desa, mengurangi korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas pengelola.Dampak Jangka Panjang pada Pembangunan Desa: Peningkatan kepercayaan masyarakat yang dipicu oleh transparansi dapat menciptakan efek jangka panjang yang positif, termasuk meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dan pencapaian tujuan pembangunan desa yang lebih berkelanjutan.

Analisis Kritis dalam temuan ini Meskipun temuan ini menunjukkan hubungan yang sangat signifikan, perlu diingat bahwa transparansi tidak selalu diikuti dengan akuntabilitas.

Masyarakat mungkin mendapatkan informasi yang transparan, tetapi jika tidak ada pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana, transparansi saja tidak cukup untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Oleh karena itu, pengelola dana desa juga harus memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan cara yang benar. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kualitas komunikasi, aksesibilitas informasi, dan kemampuan masyarakat untuk memahami laporan keuangan juga berperan penting dalam memastikan bahwa transparansi dapat benar-benar meningkatkan kepercayaan.

Pengaruh Transparansi terhadap kepercayaan masyarakat

Untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, penting bagi pengelola dana desa untuk meningkatkan transparansi, memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, dan meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.Implikasi Temuan dalam Konteks yang Lebih Luas: Pengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat: Meningkatnya transparansi yang disebabkan oleh akuntabilitas yang tinggi tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa pengelola dana desa bertanggung jawab dan terbuka dalam setiap keputusan yang diambil, mereka akan lebih yakin bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa: Transparansi yang didorong oleh akuntabilitas akan meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga terkait, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas pengelolaan dana desa. Pengelola dana desa yang sadar akan adanya pengawasan dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan akan cenderung lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian dana.Pembangunan Berkelanjutan di Desa: Dengan terciptanya pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel, pembangunan di tingkat desa akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap program-program yang dilaksanakan, yang akhirnya mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas

Meskipun temuan ini menunjukkan pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dan transparansi, perlu dicatat bahwa keberhasilan transparansi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemampuan komunikasi pengelola dana desa, aksesibilitas informasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, meskipun akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan transparansi, pengelola dana desa harus memastikan bahwa informasi yang diberikan mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Selain itu, terdapat tantangan dalam hal kapasitas pengelola dana desa untuk menyediakan laporan yang transparan dan akurat, terutama di desa-desa yang memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, dukungan pelatihan bagi pengelola dana desa sangat diperlukan untuk memastikan transparansi yang efektif

Hubungan Antara Akuntabilitas pengelolaan dana kepenghuluan Terhadap kepercayaan Masyarakat yang dimediasi transparansi

Apakah transparansi memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan, kita perlu melihat apakah hubungan antara akuntabilitas dan kepercayaan masih signifikan setelah transparansi dimasukkan sebagai mediator. Jika kita mengasumsikan transparansi berfungsi sebagai mediator, hubungan langsung antara akuntabilitas dan kepercayaan tetap signifikan, namun efeknya bisa berkurang karena transparansi berperan dalam memperjelas proses tersebut. Berdasarkan informasi ini, transparansi memiliki peran sebagai variabel yang

memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan, karena keduanya (akuntabilitas -> transparansi, dan transparansi -> kepercayaan) signifikan. Berdasarkan data dan Penelitian terdahulu Data mendukung hipotesis H4 bahwa transparansi mampu memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat.

Penelitian oleh Yuliana (2020):Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat dengan Trans paransi Sebagai Variabel Pemediasi. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Selain itu, transparansi berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Transparansi dalam hal ini memperjelas penggunaan dana desa dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan.

Teori Transparansi dan Akuntabilitas Dalam teori ini, transparansi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan akuntabilitas dengan kepercayaan. Ketika suatu institusi atau organisasi transparan dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya atau dana, masyarakat lebih mudah untuk memverifikasi bahwa tindakan yang diambil adalah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, transparansi memperjelas informasi yang sebelumnya mungkin tidak jelas atau tersembunyi, sehingga memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat.Teori ini mendukung hipotesis bahwa transparansi tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga memediasi hubungan antara akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Tanpa transparansi, meskipun akuntabilitas dapat ada, masyarakat mungkin tetap merasa ragu atau tidak percaya karena mereka tidak memiliki akses yang cukup untuk menilai kebenaran tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, dengan adanya transparansi yang jelas dan dapat diakses, pengaruh positif akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat akan semakin kuat.

Hasil penelitian Rahmawati dan Wulandari (2019) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, dan Kepercayaan Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, dan transparansi memainkan peran penting dalam memperjelas hubungan tersebut. Ketika transparansi lebih tinggi, masyarakat lebih percaya

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kepenghuluan berkaitan dengan kualitas pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah kepenghuluan. Akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi perlu disertai penyampaian informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memahami proses penggunaan dana. Dalam hal ini, transparansi menjadi bagian penting dari tata kelola karena menghubungkan pertanggungjawaban pengelola dengan kemampuan masyarakat untuk menilai pengelolaan dana secara terbuka.

Temuan penelitian memberikan pemahaman bahwa penguatan kepercayaan masyarakat memerlukan pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mudah dipantau. Pemerintah kepenghuluan perlu memastikan bahwa informasi mengenai perencanaan anggaran, alokasi dana, pelaksanaan kegiatan, dan realisasi penggunaan anggaran tersedia secara jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Keterbukaan tersebut perlu diikuti dengan ruang komunikasi dan pengawasan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi seharusnya diterapkan sebagai prinsip tata kelola yang saling mendukung, bukan sebagai prosedur administratif yang berjalan secara terpisah.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah kepenghuluan di Kecamatan Pekaitan untuk memperkuat mekanisme pelaporan, meningkatkan akses informasi keuangan, dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana. Peran Badan Permusyawaratan Kepenghuluan juga perlu diperkuat dalam menyalurkan aspirasi serta mendorong komunikasi antara pemerintah kepenghuluan dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan proses pengelolaan keuangan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan memperoleh dukungan masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena respondennya hanya melibatkan 61 anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kecamatan Pekaitan. Oleh karena itu, pengukuran kepercayaan masyarakat dalam penelitian ini merepresentasikan persepsi anggota BPKep dan belum menggambarkan pandangan seluruh masyarakat kepenghuluan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan masyarakat secara langsung, memperluas cakupan wilayah penelitian, serta mempertimbangkan faktor lain seperti partisipasi masyarakat, efektivitas pengawasan, kualitas pelayanan pemerintah, dan kompetensi aparatur. Pengembangan tersebut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan kepenghuluan.

Referensi

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Ryandi, N. A., & Sari, R. P. (2024). The Influence of Accountability and Transparency on Public Trust in Villages Mediated by Internal Control Systems in Sidoarjo. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA)*, *5*(3).

uhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). The Effects of Good Governance Principles: Accountability, Transparency, and Participation on Public Trust in Village Funds Management. *International Journal of Social Science and Business*, *7*(4).

Aprilia, I. (2019). Determinan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(2), 109-122.

Discriminant Validity in Variance-Based Structural Equation Modeling". *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115-135.

Mardiasmo. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Publik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(2), 45-60.

Koppel, J. G. S. (2005). *Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of"Multiple Accountabilities Disorder"*. Public Administration Review, 65(1), 94-108.

Rachmawati, D., & Supriyadi, S. (2020). The Role of Transparency in Enhancing Accountability and Trust in Local Government: Evidence from Indonesia. *Journal of Public Administration and*

Hassan, M., & Ahsan, S. (2017). "The Role of Transparency in Strengthening Trust in Public Institutions". *Journal of Public Policy & Governance*, 20(4), 312-328.

Murtiasih, E., & Anwar, R. (2014). Pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Desa, 2*(1), 15-22.

Kloot, L. (2009). Transparency and Accountability in Local Government. *Journal of Local Government Studies, 35*(2), 223-240.

Rahmawati, F., & Wulandari, D. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, dan Kepercayaan Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Daerah, 14*(3), 210- 223.